DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010-2021

Safrilina Husnun Nisa* dan Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: safrilina@students.undip.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the poverty rate, unemployment rate, and labor force participation rate on the human development index of DKI Jakarta. This study was conducted to find out whether or not those variables are indeed three factors that played an important role in encouraging DKI Jakarta to have the highest human development index among 33 other provinces in Indonesia. This study used panel data from 6 administrative districts and cities in DKI Jakarta during 2010-2021 using a random effect panel regression model. The results showed that there was a significant negative effect of the poverty rate and the open unemployment rate on the human development index. Meanwhile, the labor force participation rate has a significant positive effect on the human development index of DKI Jakarta during 2010-2021. According to the F-statistic, it showed the human development index simultaneously affected by the poverty rate, open unemployment rate, and labor force participation rate within 60% R-squared. This study specifically highlights economics and employment in DKI Jakarta as aspects with the most programs and policies applied.

Keywords: Human Development Index (HDI), Poverty Rate, Unemployment Rate, and Labor Force Participation Rate.



 $\underline{https://doi.org/10.14710/djoe.35412}$



This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

PENDAHULUAN

Berdasarkan *Human Development Index ranking* dalam *Human Development Report* yang diterbitkan oleh UNDP di tahun 2021, IPM Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara di dunia dengan skor IPM 71,8. Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat 5 bersama Filipina dari total 10 negara. Lalu apabila melihat lebih spesifik kualitas pembangunan manusia di Indonesia secara nasional, terutama membandingkan masing-masing provinsi, DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan angka IPM mencapai 81,11 di tahun 2021 diikuti DIY Yogyakarta dengan skor 80,22 dan Kalimantan Timur dengan skor 76,88 di peringkat tiga. Skor IPM Provinsi DKI Jakarta ini bahkan melebihi skor IPM nasional yang ada di angka 71,8.

Apabila ditinjau dari tahun 2020 ke tahun 2021, IPM DKI Jakarta mengalami pertumbuhan 0,42% di mana hal ini didukung oleh peningkatan masing-masing dimensi IPM, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH) yang meningkat sebanyak 0,14%, Harapan Lama Sekolah (HLS) 0,69%, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



0,36%, serta PDB per kapita sebesar 1,61% (BPS DKI Jakarta, 2021). Tingginya skor IPM DKI Jakarta hingga menempati peringkat satu dari total 34 provinsi di Indonesia tentunya didukung berbagai aksi berupa program dan kebijakan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Di tahun 2007, telah diluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan pada keluarga miskin. Program ini memberikan akses pada keluarga miskin untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan mereka. PKH yang masih dilaksanakan hingga tahun 2021 ini memiliki lima tujuan utama, yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban rumah tangga, menciptakan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta inklusi keuangan. Di tahun 2019 sendiri, PKH telah diterima oleh lebih dari 62 ribu Rumah Tangga. Selain PKH, terdapat program pelengkap lainnya berapa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima oleh lebih dari 176 ribu Rumah Tangga, Pangan Murah, Program Pemberian Beras Sejahtera (RASTRA), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang telah menyasar lebih dari 40 ribu lansia, dan Program Bantuan Penyandang Disabilitas yang direalisasikan pada lebih dari 7 ribu difabel (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2019). Secara keseluruhan, berbagai program tersebut memberikan kontribusi berupa penurunan persentase kemiskinan di tahun 2019 menjadi 3,47%. Terlebih lagi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah pertama di Pulau Jawa dan terendah kedua di Indonesia (BPS, 2021).

Selain menggencarkan program dan kebijakan yang menyasar pada pengentasan kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan inisiatif di aspek ketenagakerjaan demi mengurangi jumlah pengangguran. Salah satu program terbaru yang direalisasikan adalah *Jakpreneur* atau *Jakarta Entrepreneur*, sebuah platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan seperti *start-up*, institusi pendidikan, serta institusi pembiayaan atau *Financial Technology*. Hal tersebut menjadi upaya penting mengingat tingkat pengangguran DKI Jakarta yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2021, DKI Jakarta sendiri termasuk dalam delapan provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di atas rata-rata nasional, yaitu 8,5%. Angka ini turun dari tahun 2020 yaitu 10,95%. Penurunan TPT tersebut bersamaan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang cukup baik di DKI Jakarta, di mana 64% pekerjanya bekerja di sektor formal dan 69% pekerja didominasi oleh lulusan SMA ke atas (Pemprov DKI Jakarta, 2021).

upaya mengurangi pengangguran, aksi pada dalam ketenagakerjaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah dengan terus mengkaji dan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari tahun ke tahun. Dari sisi perlindungan tenaga kerja, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, telah dibentuk pula Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya bagi tenaga kerja yang memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja serta memberikan jaminan hari tua hingga pensiun. Selain melalui BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa program terbaru yang diluncurkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang bekerjasama dengan lembaga asuransi untuk memberikan perlindungan tenaga kerja, antara lain adalah program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dan Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK). Semua program ketenagakerjaan tersebut memberikan stimulasi sekaligus mendukung ekosistem bekerja pada angkatan kerja di DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena



lebih dari 70% penduduk Jakarta merupakan penduduk usia produktif dengan tingkat partisipasi kerja lebih dari 60% tiap tahunnya.

Dari berbagai program dan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang telah ditetapkan dan direalisasikan dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 dan juga dampak yang dihasilkan, disimpulkan bahwa program dan kebijakan tersebut secara spesifik menyasar pada aspek kemiskinan dan ketenagakerjaan, terutama pada pengangguran dan partisipasi kerja. Oleh karena itu, dengan tingginya performa IPM DKI Jakarta dua belas tahun berturut-turut, ketiga hal tersebut yaitu kemiskinan, pengangguran, dan partisipasi kerja berpeluang menjadi faktor yang berkontribusi besar pada tingginya IPM mengingat ketiganya merupakan aspek yang berkaitan erat dengan dimensi kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan dari paparan data historis dan fakta lapangan yang ada terkait kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta di bidang kemiskinan, pengangguran, dan partisipasi kerja, serta mempertimbangkan pencapaian IPM Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan performa sangat baik, maka keadaan tersebut menuntun untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap IPM Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Modal Manusia

Konsep modal manusia didefinisikan sebagai kemampuan ataupun kapasitas yang telah ada sejak lahir maupun dibentuk saat tumbuh yang bertujuan untuk mencapai suatu kemapanan ekonomi (Schultz dan Becker, 1964). Yan et al (2005) menyatakan bahwa modal manusia ialah akumulasi pendidikan, termasuk pengetahuan dan keterampilan pada usia produktif yang didapat dari pendidikan formal, pelatihan, maupun pengalaman. Becker dalam teori *Human Capital* memandang modal manusia sebagai *value* atau nilai yang bertambah dari seorang pekerja ketika mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan aset lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan dalam proses produksi.

Human Capital Theory yang dipopulerkan oleh Becker dan Rosen menekankan bahwa tiap-tiap pekerja memiliki seperangkat keterampilan atau kemampuan yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Proses pendidikan, pembelajaran, nilai, serta keterampilan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas yang mana akan berpengaruh pada pendapatan orang tersebut di masa datang. Menurut Mayo (2000), human capital atau sumber daya manusia memiliki lima komponen, yaitu individual capability, individual motivation, leadership, organizational climate, dan workgroup effectiveness.

Pembangunan Manusia

Di tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) melalui penerbitan *Human Development Report*, pertama kalinya memfamiliarkan konsep Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan manusia atau *enlarging people's choice* sebagai sinyal pemenuhan taraf kehidupan yang lebih baik. UNDP (1995) menyinggung perihal penjaminan tercapainya tujuan



pembangunan manusia, terdapat empat unsur pokok mengenai ini, antara lain yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Menurut Ranis dalam Winarti (2004), pembangunan manusia menjadi salah satu variabel yang dapat memaksimalkan keuntungan. Pembangunan manusia berhubungan erat dengan modal manusia, dimana modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan manusia akan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, terdapat standar yang telah ditetapkan oleh UNDP berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah dimensi dasar dari kualitas hidup, antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiganya akan menjadi gabungan indeks yang dirata-rata.

Formula yang digunakan dalam menghitung indeks yaitu:

Indeks X (i,j) =
$$\frac{(X(i,j)-X(i-\min))}{(X(i-\max)-X(i-\min))}$$
 (1)

keterangan:

 $X_{(i,j)}$: indeks komponen ke-i dari daerah j

 $X_{(i-min)}$: nilai minimim dari Xi $X_{(i-maks)}$: nilai maksimum dari Xi

Tabel 1. Nilai Maks dan Min Komponen IPM

Indikator IPM	Maks	Min	
IIIUIKAIOI IFIVI	IVIAKS	IVIIII	
АНН	85	25	
Angka Melek Huruf	100	0	
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	
Daya Beli (PPP)	737.720	360.000	

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Manusia:

$$IPM = \frac{1}{3} (IHH + ILS + ISHL)$$
 (2)

di mana:

IHH : indeks harapan hidupILS : indeks lama sekolahISHL : indeks standar hidup layak

Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan pendapatan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidupnya, (Suryawati, 2004). UNDP juga menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan pendapatan dan kesulitan dalam ekonominya. Disisi lain, kemiskinan dipandang sebagai situasi dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan air minum yang bersih, serta terbatasnya akses untuk berpartisipasi dalam proses politik. Oleh karenanya kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensi.

Sejalan dengan Kuncoro (2000), kemiskinan dikatakan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum, dimana standar hidup



rendah dapat diindikasikan dengan jumlah pendapatan yang juga rendah, tempat tinggal yang tidak layak, serta kesehatan yang buruk, dan juga pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Hal lain yang dapat mengukur standar hidup suatu wilayah adalah *Gross National Product* (GNP) per kapita, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (2000), pengangguran merupakan seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja dimana ia secara aktif sedang mencari pekerjaan dan belum mendapat pekerjaan. Serupa dengan Sukirno, Badan Pusat Statistik melalui indikator ketenagakerjaan memaparkan bahwa pengangguran sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan ataupun penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena telah diterima bekerja di suatu tempat namun belum mulai bekerja. Dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah, dapat menggunakan pendekatan angkatan kerja atau pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Menurut Sukirno, pengangguran dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu:

- 1. Pengangguran Normal atau Friksional
 - Isilah full-employment merujuk pada keadaan dimana dalam suatu perekonomian terdapat 2-3% pengangguran dari jumlah tenaga kerja yang ada. Pengangguran sebanyak itulah yang dinamakan pengangguran normal atau friksional. Pengangguran jenis ini merupakan pengangguran akibat seorang pekerja yang memilih pindah dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik ataupun belum mendapat pekerjaan karena sedang mencari kerja.
- 2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur dalam perekonomian. Fenomena ini muncul karena pada praktiknya tidak semua industri dalam sebuah perekonomian dapat bertahan. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan produksi menurun sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dan berujung pada pengangguran. Pengangguran dalam situasi tersebut dinamakan pengangguran struktural.

- 3. Pengangguran Siklikal
 - Dalam prosesnya, kondisi perekonomian terkadang mengalami fluktuasi. Ketika permintaan agregat turun, maka hal ini menyebabkan dampak pula pada perusahaan lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut untuk mengalami kemerosotan pada permintaan produksinya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus mengurangi tenaga kerja sehingga banyak orang yang menganggur. Pengangguran jenis inilah yang dinamakan pengangguran siklikal.
- 4. Pengangguran Teknologi
 - Jenis pengangguran berikutnya merupakan pengangguran teknologi yang mana disebabkan oleh pergantian tenaga manusia menjadi mesin otomatis berteknologi tinggi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin-mesin otomatis cenderung tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak dalam proses produksinya sehingga penggantian sistem semacam itu dapat menyebabkan pengangguran.



Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai mereka yang merupakan bagian dari tenaga kerja yang saat ini sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik menyebutkan TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai persentase antara penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingginya TPAK mengindikasikan tingginya pula penawaran tenaga kerja (*labor supply*) yang ada untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Simanjuntak (2001) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa TPAK merupakan suatu kelompok penduduk yang dihitung dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Dalam menentukan TPAK, dapat dihitung berdasarkan kelompok jenis kelamin, tempat tinggal (kota/desa), serta dapat pula berdasarkan kelompok umur. TPAK memotret jumlah angkatan kerja yang dibagi dengan jumlah tenaga kerja di suatu kelompok yang sama.

$$TPAK = \frac{Jumlah \ angkatan \ kerja}{Jumlah \ tenaga \ kerja \ (penduduk \ usia \ 15-64 \ tahun)} \times 100\%$$
 (3)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Provinsi DKI Jakarta, Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) BAPPENAS, serta Jakarta Open Data. Data yang digunakan adalah data panel berupa data *series* dari tahun 2010 hingga 2021 dan data *cross-section* 6 kabupaten dan kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Keseluruhan data yang digunakan adalah data IPM (dalam %), Tingkat Kemiskinan (%), TPT (%), dan TPAK (%) DKI Jakarta tahun 2010-2021.

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah melalui studi pustaka, yang mana merupakan suatu teknik mendapat informasi melalui dokumen, literatur, dan dokumentasi lainnya yang relevan. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap, pertama melakukan beberapa uji untuk menentukan salah satu pendekatan estimasi model regresi data panel yang terbaik, kemudian dilanjutkan melakukan deteksi penyimpangan asumsi klasik, dan terakhir melakukan uji statistik atau uji hipotesis. Terdapat 3 model estimasi regresi data panel, yaitu:

1. Common Effect Model (CEM)

Estimasi parameter data panel dengan model CEM dilakukan dengan mengombinasikan data *cross-section* dan data *time-series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat dimensi waktu dan individu. Persamaan *Common Effect Model* (CEM) yaitu:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it}$$

$$\tag{4}$$

2. Fixed Effect Model (FEM)

Istilah Fixed Effect Model (FEM) didasarkan pada perbedaan intersep antar unit individu dengan kesamaan intersep antar waktu. Selain itu, model ini memiliki asumsi bahwa koefisien regresi atau slope adalah tetap antarindividu dan antarwaktu. Persamaan *Fixed Effect Model* (FEM):



$$IPM_{it} = (\beta_0 + u_i) + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it}$$
 (5)

3. Random Effect Model (REM)

Pendekatan REM merupakan teknik estimasi yang melibatkan variabel gangguran atau error term yang bisa muncul pada hubungan antar waktu dan individu. Persamaan *Random Effect Model* (REM):

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + e_{it} + u_i$$
(6)

Untuk menentukan model yang paling tepat dari ketiga model di atas, dilakukan uji model estimasi pane berupa:

- 1. Uji Chow, untuk menentukan manakah diantara CEM dan FEM yang lebih sesuai.
- 2. Uji Hausman, untuk membandingkan antara REM dan FEM.
- 3. Uji Lagrange Multiplier, untuk menentukan pendekatan REM atau CEM yang lebih sesuai.

Setelah didapat model estimasi regresi panel yang terbaik, dilakukan deteksi penyimpangan asumsi klasik berupa deteksi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Ketika model telah bebas dari masalah asumsi klasik, analisis data dilanjutkan dengan melakukan uji statistik atau hipotesis berupa koefisien determinasi (*r-squared*), uji F-statistik, dan uji t-statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai langkah awal analisis regresi data panel, dilakukan beberapa uji untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai untuk digunakan. Dari ketiga uji yang telah dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, disimpulkan bahwa analisis regresi data panel akan dilakukan dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM). Model *Random Effect* yang digunakan telah lolos deteksi penyimpangan asumsi klasik berupa deteksi heteroskedastisitas, normalitas, dan multikolinearitas sehingga dapat dilakukan regresi panel setelahnya. Didapatkan hasil uji statistik regresi panel *Random Effect Model* (REM) sebagai berikut:

Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Tabel 2. Hasil Estimasi Koefisien Determinasi

_ 110 12 _1 _2 110 12 _2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		
R-squared	0,607750	
Adjusted R-squared	0,590445	

Tabel 2 menunjukkan hasil regresi *Random Effect Model* (REM) yang memperlihatkan *R-squared* sebanyak 0,607750. Hal ini berarti variasi variabel independen yang digunakan berupa Tingkat Kemiskinan, TPT, dan TPAK dapat menjelaskan variasi variabel dependen IPM sebesar ~61% dan 39% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.



Uji F

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji F

F-statistic	Prob (F-Statistic)	
35,111965	0,0000	

Hasil estimasi Uji F pada Tabel 3 menunjukkan nilai 0,000 kurang dari 0,05. Dengan hasil yang demikian maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel Tingkat Kemiskinan, TPT, dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji t

Tabel 4. Hasil Estimasi Uji t

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
TK	-0,649644	0,152909	-4,248563	0,0001	Signifikan
TPT	-0,281489	0,065515	-4,296585	0,0001	Signifikan
TPAK	0,300431	0,033203	9,048247	0,0000	Signifikan

Persamaan regresi REM yang terbentuk yaitu:

$$IPM_{it} = 64,39189 - 0,649644 TK_{it} - 0.281489 TPT_{it} + 0,300431*TPAK_{it} + e_{it}$$
 (7)

Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien -0,649644. Hal tersebut memiliki arti bahwa penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,649644%. Hasil tersebut sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang secara umum menegaskan bahwa tingkat kemiskinan berhubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Amate-Fortes di tahun 2017 juga memvalidasi hasil penelitian ini dimana ditekankan bahwa pembangunan manusia dapat ditingkatkan salah satunya dengan melakukan pengentasan kemiskinan. Penelitian lain yang mengambil sampel di Provinsi D.I. Yogyakarta oleh Pangestika dan Widodo di tahun 2017 juga menunjukkan hasil yang sama dimana tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM Yogyakarta.

Realisasi beberapa program pengentasan kemiskinan di kabupaten dan kota administrasi DKI Jakarta berhasil menyasar puluhan ribu penduduk dan dapat menekan laju kemiskinan di tahun 2011 menjadi 3.64%, tahun 2014 menjadi 3,7%, dan di tahun 2019 menjadi 3,47%. Disaat yang bersamaan, turunnya tingkat kemiskinan tersebut dapat membantu meningkatkan nilai IPM DKI Jakarta hingga masuk ke kategori sangat tinggi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa penggencaran program pengentasan kemiskinan dapat berkontribusi meningkatkan nilai IPM DKI Jakarta selama tahun 2010-2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Regresi REM menunjukkan hasil yang negatif signifikan antara TPT terhadap IPM dengan nilai koefisien -0,281489. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penurunan 1% TPT akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,281489%. Hasil analisis data bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM sesuai dengan teori umum bahwa pengangguran menjadi penyebab tidak maksimalnya tingkat



kesejahteraan yang dapat dicapai suatu wilayah. Hasil tersebut juga didukung penelitian tahun 2021 yang dilakukan oleh Alfiyan dan Mujiyati yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian Si'lang *et al* tahun 2019 yang mengambil studi di Provinsi Sulawesi Barat.

Berkurangnya pengangguran berakibat pada lebih banyaknya penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan sehingga mampu membiayai hidupnya. Hal ini memberikan dampak positif pada kualitas manusia di DKI Jakarta sejalan dengan meningkatnya IPM dari tahun ke tahun. Ekosistem UMKM yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan daerah serta perluasan lapangan pekerjaan yang dilakukan terbukti mampu menurunkan pengangguran yang akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan manusia di DKI Jakarta tahun 2010-2021.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai prob t-statistik variabel TPAK sebesar 0,0000 kurang dari batas signifikansi 0,05. Koefisien variabel TPAK bernilai 0,300431 yang artinya variabel TPAK berpengaruh positif terhadap IPM dimana peningkatan 1% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja akan meningkatkan IPM sebesar 0,300431%. Hasil yang demikian didukung pula oleh Sherwani dalam penelitiannya di tahun 2017 yang berjudul "Correlates of Human Development in Low, Medium, High, and Very High Human Developed Nations". Penelitian tersebut menegaskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan yang positif terhadap IPM. Hasil serupa juga diperoleh dalam penelitian Sutikno tahun 2017 serta Melliana dan Zain di tahun 2013 yang meneliti pengaruh TPAK terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur.

Realisasi program dan kebijakan terkait jaminan ketenagekerjaan dapat meningkatkan ekosistem aktif bekerja di DKI Jakarta sehingga memacu penduduk usia produktif untuk bekerja mendukung pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menjadikan kegiatan ekonomi dan produksi dapat berjalan secara aktif yang juga merupakan indikator baiknya kualitas pembangunan manusia di DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan dan TPT berpengaruh negatif signifikanm, sedangkan TPAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM DKI Jakarta periode tahun 2010-2021. Melalui Uji F, ketiganya terbukti secara simultan berpengaruh pada IPM DKI Jakarta dengan nilai koefisien determinasi sebesar 60%. Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan secara aktif meningkatkan pembangunan manusia. Penciptaan ekosistem kerja yang aman dan terjamin serta tersedianya insentif yang sesuai akan mendorong partisipasi kerja masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pembangunan manusia di DKI Jakarta.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyan, & Mujiyanti. (2021). Analysis of factors affecting the human development index in West Java Province (2013-2019) [The 14th University Research Colloqium].
- Amalia, N. A., Wulandari, S., Mentari, E. C., Rizky, I. M., Dalimunthe, J. W., Pane, R., & Purba, U. A. (2021). Analysis of factors that impression the human development index in increasing Indonesian economic growth in North Sumatra Province. *Journal of Social Research*, *1*(1), 32–35. https://doi.org/10.55324/josr.v1i1.15
- Amate-Fortes, I., Guarnido-Rueda, A., dan Molina-Morales, A. (2017). Economic and social determinants of human development: A new perspective. *Social Indicators Research*, 133(2), 561–577.
- Arisman, A. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota tahun 2015-2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. (2021). Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota 2010-2021.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan manusia*. https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html
- Badan Pusat Statistik. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Kondisi Februari dan Agustus 2020.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. (2022). *Penduduk miskin DKI Jakarta* https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/
- Badan Pusat Statistik. (2020). Penduduk Provinsi DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan angkatan kerja 2018-2020
- Bank Indonesia. (2021). Laporan perekonomian Provinsi DKI Jakarta Mei 2021.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)*. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/51
- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. (n.d.). *Tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota 2011-2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta menurut kabupaten/kota tahun 2010-2021.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Survei biaya hidup (SBH) 2018.
- Barus, E. N., Tarmizi, H. B., & Rahmanta. (2021). Analysis of factors affecting human development index in the city of Binjai. *International Journal of Research and Review*, 8(4), 161–170.
- Blanchard O., Amighini, A., Giavazzi, F. (2010). *Macroeconomics: A European perspective*. Pearson.
- Cahyanti, N. D., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Faktor-faktor indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jambura Economic Education Journal*, *3*(2), 93–101. https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11036



- Chalid, & Yusuf. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, upah minimun kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
- Databoks Katadata. (2021). Terserap sektor formal, tingkat pengangguran Jakarta turun drastis pada agustus 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/27/terserap-sektor-formal-tingkat-pengangguran-jakarta-turun-drastis-pada-agustus-2021
- Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics. The McGraw-Hill.
- Humaira, U. H., Nugraha, J. (2018). Analysis of factors affecting the human development index in West Kalimantan province using data panel data regression. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 18, 97–105.
- Jakarta Open Data. (2014). Data indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten Kota Administrasi DKI Jakarta tahun 2007-2014.
- Jakarta Open Data. (2011). TPT dan TPAK menurut kabupaten/kota DKI Jakarta 2009-2011.
- Jakarta Open Data. (2016). Data penduduk miskin menurut Provinsi di Indonesia.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Belu. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(7), 60–84.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang berbasis pendekatan perwilayahan dan regresi panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, *1*(2), 202. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216
- Mankiw, N. G. (2001). Principles of economics. South Western College Pub.
- Masruroh, M., & Subekti, R. (2017). Aplikasi regresi *partial least square* untuk analisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kota Yogyakarta. *Media Statistika*, *9*(2), 75. https://doi.org/10.14710/medstat.9.2.75-84
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan regresi panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242. http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v2i2.4844
- Pangestika, M., & Widodo, E. (2017). Analisis regresi panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Seminar Nasional dan the 4th Call for Syariah Paper, 198–205.
- Patta, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan periode 2001 2010.
- Pemerintah DKI Jakarta. (2019). *Realisasi program penanganan kemiskinan di DKI Jakarta*. https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-program-penanganan-kemiskinan-di-dki-jakarta/
- Pemerintah DKI Jakarta. (2021). Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
- Pemerintah DKI Jakarta. (2020). *Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019*. https://statistik.jakarta.go.id/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-terbuka-provinsi-dki-jakarta-tahun-2017-2019/
- Ratnasari, G. T., Wibisono, S., & Hanim, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di wilayah eks Karisidenan Besuki. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, *3*(2), 1–14.



- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2008). Indeks pembangunan manusia manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18-26.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.
- Sherwani, R. A. K., Kamal, S., & Abbas, S. (2017). Correlates of human development index in low, medium, high, and very high human developed nations. *Pakistan Economic and Social Review*, 55(1), 31–52.
- Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2021). Data tingkat partisipasi angkatan kerja kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sugiyanto. (2006). Implikasi pengangguran terhadap pembangunan nasional serta strategi pemecahannya. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 2(2), 12.
- Sukirno, S. (2007). Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan. Kencana.
- Sumarsono. (2003). Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Graha Ilmu.
- Sutikno, B., Faruk, A., & Dwipurwani. (2017). Penerapan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Matematika Integratif*, *13*(1), 1. https://doi.org/10.24198/jmi.v13i1.11383
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic development. Pearson.
- UNDP. (2021). Human development insights.
- Wooldridge, J. M. (2015). Introductory econometrics 6th edition. *Economica*, 42(165).
- Yakunina, R. P., & Bychkov, G. A. (2015). Correlation analysis of the components of the human development index across countries. *Procedia Economics and Finance*, 24(July), 766–771. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00692-9